

EVALUASI KEBERHASILAN PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK) DI KALIMANTAN SELATAN

Agung Biworo¹, Lenie Marlinae², Syamsul Arifin², Laily Khairiyati², Agung Waskito², Anugrah Nur Rahmat², Herty Sasmiet³, M Gilmani², Winda Saukina Syarifatul Jannah²*, Raudatul Jinan²

¹Program Studi Kedokteran Program Sarjana, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

²Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

³Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

*Penulis Korespondensi: windasaukinasj@gmail.com

Abstrak. Data Kampung KB di Sungai Jingah yang diperoleh dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 menyatakan bahwa jumlah keluarga ada 1.544 keluarga. Dari jumlah tersebut, jumlah PUS 1.000 jiwa, dan untuk pengguna KB nya sebanyak 652 jiwa. Berdasarkan hasil kinerja realisasi anggaran untuk skema Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) tahun 2018, pemerintah Kabupaten/Kota hanya mampu merealisasikannya sebesar 79%. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan Program KKBPK di Kalimantan Selatan berdasarkan indikator *input*, proses, *output* serta *outcome*. Desain penelitian ini adalah *mixed methods* dimana metode ini merupakan metode kombinasi antara metode kualitatif dan kuantitatif dengan fokus penelitian evaluasi program KKBPK. Jumlah informan dalam penelitian ini ada 2 orang dan 30 orang responden. Hasil penelitian didapatkan semua variabel dalam indeks kepuasan masyarakat pada program KKBPK yang telah dijalankan berkategori puas. Hasil pada variabel *input* didapatkan bahwa SDM belum mencukupi, pendistribusian dana belum cukup, serta sarana dan prasarana mencukupi. Variabel proses didapatkan BKKBN selalu melakukan monitoring dan evaluasi. Variabel *output* didapatkan bahwa SDM kurang dan pendanaan masih terkendala serta program KB bermanfaat bagi masyarakat.

Kata kunci: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), indeks kepuasan masyarakat, *input*, proses, *output*

1. PENDAHULUAN

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) memiliki misi melakukan pembangunan keluarga dengan ekonomi produktif dan pelaksanaan fungsi keluarga. Untuk menjadi keluarga yang berkualitas, keluarga Indonesia harus mengikuti program Keluarga Berencana (KB) yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Indikator keluarga berkualitas diukur dari peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang berpatokan pada pelaksanaan 8 (delapan) fungsi keluarga. Diantaranya fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi serta fungsi pembinaan lingkungan (Januar AS, 2020).

Menurut Survei Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah (SKAP) untuk program KKBPK tahun 2019 menunjukkan capaian yang memprihatinkan. Hanya satu dari lima sasaran strategis program KKBPK tahun 2019 yang dapat memenuhi bahkan melampaui target yakni penggunaan MKJP dapat mencapai 24,6% dari target 23,5%. Angka kelahiran total yang diharapkan turun menjadi 2,28 per WUS usia 15-19 tahun, justru menunjukkan peningkatan menjadi 2,45. Begitu pula dengan penggunaan kontrasepsi modern yang anjlok menjadi 54,97% dari tahun sebelumnya 57%. Tingkat putus pakai menunjukkan angka yang sama dengan capaian SDKI 2017 sebesar 29%, meningkat 4% dari tahun 2018. Capaian Unmet need tidak bergerak di angka 12,1% (BKKBN, 2020).

Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) selama ini belum berjalan optimal baik dalam aspek garapan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Pengaturan kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, dan Pengelolaan Kependudukan yang ditandai dengan masih tingginya angka laju pertumbuhan penduduk, pernikahan usia dini, tidak terpenuhinya target capaian akseptor baru, rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) (Sudarmi, 2020).

Data Kampung KB di Sungai Jingah yang diperoleh dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 menyatakan bahwa jumlah keluarga ada 1.544 keluarga. Dari jumlah tersebut, jumlah PUS 1.000 jiwa, dan untuk

pengguna KB nya sebanyak 652 jiwa. Sasaran dari kampung KB adalah masyarakat dan disesuaikan dengan jenis program yang dilaksanakan. Kegiatan Kampung KB di Sungai Jingah yang diperoleh dari BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBP) yaitu mencakup program Bina Keluarga Balita (BKB) dengan jumlah 27 peserta, Bina Keluarga Remaja (BKR) dengan jumlah 5 peserta, Bina Keluarga Lansia (BKL) tidak mempunyai peserta, dan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dengan jumlah 6 peserta. Jumlah ini menunjukan masih kurangnya minat masyarakat dengan program yang ada karena di bandingkan dengan kampung KB sungai andai dan Kampung KB Alalak Selatan, kampung KB sungai Jingah lah yang menempati paling rendah.

2. METODE

Desain penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner (angket) mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang disebar di Kampung KB Sungai Jingah Kota Banjarmasin. Kuesioner indeks kepuasan masyarakat menggunakan skala likert, dengan alternatif nilai yang bergerak dari interval 1-4, yaitu 1. Tidak Sesuai, 2. Kurang Sesuai, 3. Sesuai, 4. Sangat Sesuai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Karakteristik Responden

3.1.1.1 Umur

Tabel 1. Distribusi frekuensi kategori umur

Kategori	Frekuensi	Persen (%)
Remaja akhir (17-25 tahun)	5	16,7
Dewasa awal (26-35 tahun)	12	40
Dewasa akhir (36-45 tahun)	9	30
Lansia awal (46-55 tahun)	4	13,3
TOTAL	30	100,00

3.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Kategori Variabel

Kategori	Frekuensi	Persen (%)
Keandalan (<i>Realibility</i>):		
Baik	30	100
Tidak Baik	0	0
Total	30	100
Daya Tanggap (<i>Respomsiveness</i>):		
Baik	30	100
Tidak Baik	0	0
Total	30	100
Empati (<i>Emphaty</i>):		
Baik	30	100
Tidak Baik	0	0
Total	30	100
Jaminan (<i>Assurance</i>):		
Baik	30	100
Tidak Baik	0	0
Total	30	100

Bukti Langsung (Tangible):		
Baik	30	100
Tidak Baik	0	0
Total	30	100

3.1.3 Hasil wawancara

3.1.3.1 Input

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan di BKKBN. Adapun untuk gambaran ketenagaan dalam pelaksanaan Program Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPk) di Kalimantan Selatan yang berjumlah 331 orang yang tersebar di kabupaten dan kota Kalimantan Selatan. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan responden:

"...Kalimantan Selatan ini hanya ada tinggal kalo tidak salah saya juga lupa datanya tapi yang jelas karena ada yang pensiun dan meninggal, hari ini juga barusan tenaga lapangan kami itu di Banjarmasin berkurang 1 karena meninggal. Kemudian jadi sekitar 331, tersebar di seluruh kabupaten/kota..." (Responden-1).

Program Program Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPk) Di Kalimantan Selatan. Dengan jumlah yang 331 orang ini masih belum mencukupi untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPk) di Kalimantan Selatan. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara responden:

"... Tentunya ini kalo ditanya apakah sudah mencukupi, dengan rasionya ya masih kurang. Idealnya paling tidak 1 PKB itu kan mampu 3 desa, kalau desanya itu kan 2.009 desa, berarti kan 2.009 bagi 3 desa kan seperti itu bu. Sehingga disini yang jadi hambatan ada beberapa 1 PKB itu di mengampu 1 kecamatan, 1 kecamatan tu kan berapa desa gitu. Persebarannya kurang merata juga dan memang dari sisi orangnya juga ga ada..." (Responden-1).

"...kurang dong karena sebentar lagi ibunya aja pensiun, banyak yang pension. Ya makanya kami kemaren yang dari bkkbn pusat sempat mengusulkan yang itu loh penerimaan p3k itu sebenarnya karena banyak honorer nah itu pingin diangkat juga gitu jadinya penyemaraan p3k itu gitu..." (Responden-2).

Daerah yang masih sangat kurang itu berada di daerah kotabaru untuk tenaga lapangan nya karena disana 1 PKB menangani 1 kecamatan daerah lain seperti Tanjung, Berabai, dan Kandnagan. Hal tersebut sesuai dengan petikan wawancara responden:

"... Daerah kotabaru, itu ada yang 1 PKB mengampu 1 kecamatan padahal kan ada berapa desa yang kosong seperti itu. Itu baru daerah kotabaru. Termasuk juga daerah Tanah bumbu, terus kemudian 13 kabupaten/kota di Kalimantan selatan bu. ..." (Responden-1).

Untuk daerah banjarmasin itu sudah lumayan banyak untuk penyebaran SDM-nya. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara responden:

"...Tentunya ya daerah-daerah kota Banjarmasin, cuman kan lebih banyak tapi ya, terkait juga nanti dari sisi SDMnya kan, mohon maaf kan usianya sudah ga muda lagi seperti itu..." (Responden-1).

Dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPk) ada dilakukan nya pelatihan untuk SDM yang bertugas yang di lakukan oleh BKKBN di bidang Litbang dan untuk pelatihan yang berikan itu tentang pelatihan terkait dengan pengetahuan kontrasepsi, kemudian pengetahuan terkait dengan pembinaan kelompok-kelompok KB nya, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, kelompok kegiatan di masyarakat, karna program BKKBN itu banyak ada BKB, BKR, BKL, remaja, Hal ini sesuai petikan wawancara dengan beberapa responden:

"...Kalau sebagai petugas lapangan dan petugas KB ya pelatihan dasar umum kemudian nanti ada pelatihan terkait dengan pengetahuan kontrasepsi, kemudian pengetahuan terkait dengan pembinaan kelompok-kelompok KB nya, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, kelompok kegiatan di masyarakat, karna program BKKBN itu kan banyak ya bu, ada BKB, BKR, BKL, remaja, itu mungkin ilmu-ilmunya diadakan pelatihan-pelatihan..." (Responden-1).

Pelatihan yang didapat oleh petugas lapangan akan dilakukan pretest dan posttest untuk mengetahui standar pengetahuan yang di dapat oleh petugas. Namun apabila petugas tersebut masih kurang memenuhi

standar akan tetap jadi jadikan petugas karena kurangnya tenaga lapangan untuk sekarang ini. Hal ini sesuai dengan petikan dari wawancara responden:

"...Kalau terkait dengan pelatihan tentunya ini ya, kan memang ada pretest posttest ujiannya kan seperti itu. Tentunya kalo apakah nanti mereka boleh di lapangan ya, karna memang lagi-lagi kekurangan dari tenaga ya akhirnya mau ga mau kan boleh di ini kan, karna kalo terkait dengan kompetensi, memang di PKB, PLKB ini ada standar kompetensi yang ditetapkan. Tapi harus diketahui juga bahwa dari jumlah sekitar 330an PKB yang lulus uji kompetensi juga ga terlalu banyak. Tapi ya mau ga mau tetap harus digunakan...." (Responden-1)

2. Pendanaan

Pembentukan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dibentuk oleh BKKBN dengan pendanaan di dapat dari 70% APBN dan 30% dari APBD. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan beberapa responden:

"...Kalo dipersentasekan kalo tidak salah itu sekitar 70% APBN: 30% APBD. Cuma yang jadi masalah itu dalam hal pencairan dana dan lain sebagainya, itu yang menghambat beberapa kegiatan...." (Responden-1).

"...kami pakai anggaran APBN, terus biasanya gini, biasanya tiap ini, kemaren habis koren, koren itu konsolidasi perencanaan anggaran. Biasanya anggarannya itu sudah dipatok oleh kemenkeu itu sama pusat sudah diglondong-glondongin. Misal program KB dapatnya berapa dengan target misal dia kegiatannya harus ada ini ini ini. Kalau yang tahun 2022 nanti kami difokuskan ke stunting..." (Responden-2).

Ketersediaan dana dalam pelaksanaan Program Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) biasanya pencairan nya itu bisa 1- 3 bulan baru bisa untuk pencairan dana nya untuk pelaksanaan kegiatan. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan beberapa responden:

"...biasanya satu dua bulan itu nggak bisa langsung laksanakan kegiatan karena dana kan memang nggak bisa langsung cair gitu kan..." (Responden-2).

"...3 bulan baru cair. Dana yang dari BKKBN kan masuk ke BUKB, kemudian mengajukan anggaran, setelah anggaran disetujui baru nanti pelaksanaan kegiatan, setelah pelaksanaan kegiatan baru diberikan. Dalam sistem klaim nya itu perlu waktu sekitar 2-3 bulan baru cair...." (Responden-1).

Pendistribusian dana dalam pelaksanaan Program Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) masih belum cukup. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dari responden:

"...Kalo terkait dengan anggaran , kalo dibilang cukup ya pasti ada tambahan lagi ya, karna dana itu kan APBN, APBN terutama di dalam program ini ada APBN sama APBD. Memang saat ini yang untuk KB, dana yang dari APBN ini masuk ke dalam BUKB di daerah. Tapi kalo dibilang cukup atau tidak tentunya pastinya masih kurang ya dibanding sama yang diperlukan..." (Responden-1).

3. Sarana dan Prasarana

BKKBN telah memfasilitasi seperangkat bis dan bisa untuk berkeliling. Di dalam yang non fisik itu ada juga terkait pengadaan sarana seperti membuat KIE-kit dan alkohol, dan itu dibayai oleh BUKB. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dengan beberapa responden:

"...Untuk pelayanan keluarnya kami punya bis juga kan kalau ke kabupaten kota. Kalau misal kabupaten kota nggak ada tempat untuk pelayanan kami pakai bis biasanya. Untuk... biasanya kalau untuk yang toa yang kami jalan-jalan keliling ..." (Responden-2).

".... Di dalam yang non fisik itu ada juga terkait pengadaan sarana seperti membuat KIE-kit itu ada, dan itu dibayai oleh BUKB. Tapi kalo untuk di BKKBN provinsi sendiri yang ada adalah pengadaan terhadap alkon dan distribusinya, jadi kami mengadakan alkon dan mendistribusikan alkon ke kabupaten/kota." (Responden-1).

Pendistribusian sarana dan prasana dalam pelaksanaan Program Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sudah lumayan baik dari provinsi ke kabupaten/kota maupun faskes. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara dari responden:

"...Di dalam yang non fisik itu ada juga terkait pengadaan sarana seperti membuat KIE-kit itu ada, dan itu dibayai oleh BUKB. Tapi kalo untuk di BKKBN provinsi sendiri yang ada adalah pengadaan terhadap alkon dan distribusinya, jadi kami mengadakan alkon dan mendistribusikan alkon ke kabupaten/kota, nah

nanti dari kabupaten/kota ada dana tu untuk mendistribusikan dari kabupaten ke faskes-faskes. Kalau dari provinsi ke kab beda2 tergantung dari jaraknya, karena dari distribusnyakan hanya pejalan dinas, tapi kalau yang dari kabupaten ke kecamatan mungkin tergantung atau sama, saya kurang tau bu, tapi yang jelas ada anggarannya....” (Responden-1).

“...Tapi setelah sekarang tiap kabupaten kota itu sudah punya muyan eh mopen, mobil penerangan itu kami sudah nggak tapi itu lagi kalau mereka butuh baru kami itu. Soalnya per kabupaten sudah mencukupi sudah itu...” (Responden-2).

3.1.3.2 Proses

Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam proses pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan bidang bidang yang ada agar berjalan sesuai perencanaan dan selalu memonev kegiatan yang sedang dilaksanakan terutama di bagian SDM nya. Hal ini sesuai petikan wawancara dengan beberapa responden:

“...SDM yang monev ya, monev untuk terkait dengan yang KB, tentunya kita bisa berkoordinasi dengan bidang lain misalnya kesekretariat dari bidang litbang terkait dengan ya tadi misalnya sdmnya tadi distribusi, kita bicara tentang distribusi alkon aja ya, kita kerjasama dengan sekretariat untuk turun ke kab/kota melihat kira-kira bagaimana sih alkon yang sudah tidak atau expired nah itu tentunya menjadi apa sih itunamanya.. tindak lanjut, agar alkon itu segera dimusnahkan seperti itu, kemudian terkait dengan capaian pelayanan itu juga ada monevnya, dengan cara mengadakan rapat pengendalian program, itu juga dibahas terkait capaian2 pelayanan kb yang kurang dimana, komplikasi apa dan yang lain sebagainya seperti itu...” (Responden-1).

Monev pada Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dilakukan setiap bulan sekali untuk tidak terprogram yang dilakukan pada saat turun lapangan ataupun pada waktu pelayanan, sedangkan untuk yang terprogram itu dilakukan 3 kali pertahun untuk monev nya. Hal ini sesuai petikan wawancara dengan beberapa responden:

“...Tiap bulan sih, jadi tiap kita turun lapangan walaupun ada pelayanan disitu kita juga lakukan monev, walaupun ada pelayanan kan kita melakukan kaya tanya jawab gitu ya, nanti disitu ada gk keluhanya apa, itu nanti jadi tindak lanjut kami diprovinsi untuk memberikan, apa namanya ee tindak lanjut nya dan kalau yang terprogram sekitar 3 kali dalam setahun ...” (Responden-1).

Pelaporan mengenai program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) biasanya langsung dimasukan dalam aplikasi jadi kabupaten dan kota langsung memasukan laporannya ke aplikasi tersebut jadi bisa langsung di terima oleh provinsi dan untuk pelaporan sudah sesuai semuanya. Hal ini sesuai petikan wawancara dengan beberapa responden:

“...sudah sesuai, tapi itu jatuhnya nanti ke data dan informasi bagian adpin. Jadi eee gini, dari kabupaten kota kalau mereka melaksanakan pelayanan atau tentang KB itu masuknya ke aplikasi yang ada di adpin, nanti SR Namanya. Nanti narik data baru kami dibagi, kami tau berapa-berapa nanti kami monitoring dan evaluasi ke kabupaten kota lagi gitu. Kalau untuk yang tadi dana BOKB yang bisa sharing dengan dana DAK itu kami bisa pegang sendiri, jadi mereka Cuma mengisi google form nanti per... per... per apa Namanya per triwulan, per tiga bulan sekali nanti ini eee apa Namanya dipaparin kepusat gitu...” (Responden-2).

Proses pendanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) masih sesuai dan bagus karena dari BKKBN memiliki dana kas terlebih dahulu sebagai cadangan. Cuman masih ada yang kurang dari segi transpot untuk kader yang mana untuk pendanaan biasanya masih terlambat untuk pencairannya. Hal ini sesuai petikan dengan wawancara responden:

“...ya kebetulan kan saya bendahara juga. Jadi gini, setiap kali pelaksanaan kalau kami ya pelaksanaan kegiatan misal ada sosialisasi atau apa, itu yang urgent kayak transport peserta, konsumsi dan semuanya itu kalau aku sendiri bendahara aku kasih persequote untuk itu. Persequote itu uang ya uang untuk yang urgent dulu, untuk setelah itu, setelah SPJnya selesai baru dirembes diklaim ke kami gitu...” (Responden-2).

“...masih kurang di pendanaan dan transpot, karena memang anggaranya begitu, tapi sebenarnya bkkbn sudah sesuai spm kementerian keuangan 150, tetapi begitu keluar kekabupaten kan mereka ada perda yang harus disesuaikan nah itu ...” (Responden-1).

Proses pendanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang masih jadi permasalahan itu di bagian gaji ke tenaga lapangan yang harus menggunakan no rekening yang mengakibatkan ada dana yang tidak bisa terambil semua. Hal ini sesuai petikan dengan wawancara responden:

"... Iya mengendap 50 ribu ya, cuman bisa ambil 50. Itu juga sudah kami sampaikan ke pusat bu, terkait kegiatan itu, karena itu juga jadi hambatan kami pada saat pelaksanaan program berupa pelayanan... (Responden-2).

3.1.3.4 Output

1. Penilaian

Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) untuk sumber daya manusia nya masih kurang. Sedangkan untuk pendanaan juga masih ada kendala terutama dibagian pencairan dana untuk program dan gaji tepetus dan BKKBN telah memfasilitasi seperangkat bis dan bisa untuk berkeliling. Di dalam yang non fisik itu ada juga terkait pengadaan sarana seperti membuat KIE-kit dan alkohol, dan itu dibayai oleh BUKB. Hal ini sesuai petikan wawancara dengan responden:

"...Tentunya ini kalo ditanya 330 orang apakah sudah mencukupi, dengan rasionya ya masih kurang. Idealnya paling tidak 1 PKB itu kan mampu 3 desa, kalau desanya itu kan 2.009 desa, berarti kan 2.009 bagi 3 desa kan seperti itu bu. Sehingga disini yang jadi hambatan ada beberapa 1 PKB itu di mengampu 1 kecamatan, 1 kecamatan tu kan berapa desa gitu. Persebarannya kurang merata juga dan memang dari sisi orangnya juga ga ada...." (Responden-1).

"...3 bulan baru cair. Dana yang dari BKKBN kan masuk ke BUKB, kemudian mengajukan anggaran, setelah anggaran disetujui baru nanti pelaksanaan kegiatan, setelah pelaksanaan kegiatan baru diberikan. Dalam sistem klaim nya itu perlu waktu sekitar 2-3 bulan baru cair. Iya mengendap 50 ribu ya, cuman bisa ambil 50. Itu juga sudah kami sampaikan ke pusat bu, terkait kegiatan itu, karena itu juga jadi hambatan kami pada saat pelaksanaan program berupa pelayanan...." (Responden-1)

"...Di dalam yang non fisik itu ada juga terkait pengadaan sarana seperti membuat KIE-kit itu ada, dan itu dibayai oleh BUKB. Tapi kalo untuk di BKKBN provinsi sendiri yang ada adalah pengadaan terhadap alkon dan distribusinya, jadi kami mengadakan alkon dan mendistribusikan alkon ke kabupaten/kota, nah nanti dari kabupaten/kota ada dana tu untuk mendistribusikan dari kabupaten ke faskes-faskes. Kalau dari provinsi ke kab beda2 tergantung dari jaraknya, karena dari distribusikan hanya pejalan dinas, tapi kalau yang dari kabupaten ke kecamatan mungkin tergantung atau sama, saya kurang tau bu, tapi yang jelas ada anggarannya...." (Responden-1).

"...Kalau mencapai target ada reward, tahun kemaren kami ada, ini baru aja sih bu di inisiasi "Gerakan Haragu Banua" itu terobosan dari pak kepala untuk meningkatkan capaian KB. Di tahun 2020 kemaren kami buat suatu terobosan untuk meningkatkan capain kb-kcp karena di kalsel ini paling rendah seindonesia 10,6%. Nah ternyata dalam pelaksanaannya kami memberikan reward bagi bidan, asektor yang ikut pelayanan dan pada pkb. Hadiahnya ada tv ada macam2 bu tv, sepeda, laptop untuk pkb, dananya ada sekita 25 juta untuk 13 kab/kota karena terobosan ternyata setelah kita lihat review program ini ternyata kita awalnya 10,6% itu sekarang sudah meningkat menjadi 11,02% walaupun 0, saja tapi lumayan...." (Responden-1).

"...Tapi setelah sekarang tiap kabupaten kota itu sudah punya muyan eh mopen, mobil penerangan itu kami sudah nggak tapi itu lagi kalau mereka butuh baru kami itu. Soalnya per kabupaten sudah mencukupi sudah itu...." (Responden-2).

2. Umpan Balik

Adanya Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bermanfaat bagi masyarakat tersebut yaitu dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keluarga berencana. Hal ini sesuai petikan wawancara dengan beberapa responden:

"...untuk, ya mungkin mereka merasalah kalau kita ngomong vasektomi, kita ngomongin IUD, gimana cara pemasangan IUD, itu mereka tabu gitu. Tapi karena itu jadi mereka... Jelas otomatis, setiap kita sosialisasi ke masyarakat itu malah banyak antusias mereka tapi kadang mereka menerimanya tabu kan Bahasa kami yang di KB ini kan mungkin agak vulgar. Tapi kami posisinya membawakan dengan santai, dengan guyon jadi mereka mulai bisa memahami gitu walaupun menurut mereka masih tabu ya bahasanya dan kebanyakan di Kalsel ini pada nggak mau IUD karena ada kok yang bilang kalau fisik kah tabu kah apa kah

kalau masalah kawasan IUD kan didalam Rahim ya jadi kan mereka malu gitu untuk itu, itu. pengetahuan masyarakatnya semakin bagus lah mereka semakin tahu kan tentang itu gitu. Trus ini ada implant khusus 1 batang mereka antusias, tapi karena kemaren ada refocusing ngga ada pengadaan lagi gitu...” (Responden-2).

Keuntungan lain yang didapatkan dengan adanya Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yaitu dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini sesuai petikan wawancara dengan responden:

“...Tentunya untuk masyarakat banyak keuntungannya ya bu, khususnya untuk kb kan masyarakat bisa mengakses terkait alkonnya secara gratis, harapannya kan bisa lebih sehat lagi, kalau dengan keuntungan bkbb kalau misalnya masyarakat sehat kan program2 dari pusat kan jadi lebih mudah tercapai, nah sekarang kan mulai ada lagi stunting jadi tahun depan kita muali ngerjakan stunting lagi mulai tahun ini sudah ada tim...” (Responden-1).

“...ya iya, kalau nggk diuntungkan, antara masyarakat ataupun instansi ini sama-sama diuntungkan. Kalau nggk diuntungkan otomatis kita sudah dilebur dari awal kan banyak orang mengira kalau BKKBN bisa disatuin sama dinkes, dinas kesehatan...” (Responden-2).

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pembahasan Indeks Kepuasan Masyarakat

Diketahui bahwa pada variabel keandalan didapatkan hasil berkategori baik (100%). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa kehandalan memberikan pelayanan yang profesional serta akurat dan memuaskan bagi kepuasan responden. Kemudian pada variabel daya tanggap juga menunjukkan hasil berkategori baik (100%). Pernyataan tersebut menyatakan bahwa daya tanggap mampu menunjukkan rasa kepercayaan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada responden dengan tanggap. Variabel empati juga menunjukkan hasil dengan kategori baik (100%), Untuk empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik untuk memberikan perhatian terhadap setiap responden serta pengertian terhadap keluhan-keluhan responden sehingga tercapai kepuasan responden. Kemudian variabel jaminan menunjukkan hasil berkategori baik (100%) jaminan ini telah memberikan rasa aman dan terjaminnya responden dalam melakukan pelayanan sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan kepada pasien. Serta pada variabel bukti langsung menunjukkan hasil dengan kategori baik (100%), bukti langsung ini yang mencakup penampilan fisik, perlengkapan pegawai, dan sarana komunikasi untuk lebih lagi mengoptimalkan atau mengutamakan bukti langsung demi kepuasan responden (Sondakh *et al.*, 2019).

Pada penelitian terlihat bahwa semua variabel dalam indeks kepuasan masyarakat pada program KKBPK yang telah dijalankan berkategori baik, meskipun berdasarkan hasil sebelumnya terdapat beberapa masyarakat yang masih merasa bahwa beberapa indikator pada variabel tersebut kurang baik tetapi secara keseluruhan berdasarkan hasil statistik variabel keandalan, daya tanggap, empati, jaminan dan bukti langsung berkategori baik. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rahmat Hidayat dan Anggraeni Wulandari tahun 2021 yang menyatakan bahwa (a) dimensi keandalan, (b) dimensi daya tanggap, (c) dimensi kepastian, (d) dimensi empati, dan (e) dimensi berwujud. Hasil perhitungan rata-rata keseluruhan poin penilaian diperoleh nilai sebesar 90% yang menandakan mitra merasa puas (Hidayat & Anggraeni, 2021).

Selain itu, penelitian ini sejalan pula dengan penelitian oleh Suandi tahun 2019 yang meskipun menggunakan variabel yang berbeda berupa Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, tetapi tetap memiliki kesamaan dengan variabel yang digunakan pada penelitian ini yang merupakan teori yang medasari terbentuknya Keputusan menteri tersebut, dengan hasil berupa a) prosedur pelayanan dengan kategori baik, (b) Persyaratan pelayanan dengan kategori Baik, (c) Kejelasan petugas pelayanan dengan kategori Baik, (d) Kedisiplinan petugas pelayanan dengan kategori Baik, (e) Tanggung jawab petugas dengan kategori Baik, (f) kemampuan petugas pelayanan dengan kategori baik, (g) Kecepatan pelayanan dengan kategori Baik, (h) Keadilan mendapatkan pelayanan dengan kategori Baik, (i) kesopanan dan keramahan petugas dengan kategori baik, Kewajaran biaya pelayanan dengan kategori Baik, (k) Kepastian biaya pelayanan dengan kategori Baik, (l) Kepastian jadwal pelayanan dengan kategori Baik, (m) Kenyamanan lingkungan dengan kategori Baik, dan (n) Keamanan pelayanan dengan kategori Baik (Suandi, 2019).

Sejalan pula dengan penelitian Ely Karmeli tahun 2014 yang menggunakan variabel yang sama dengan penelitian oleh Suandi dengan hasil berupa, pada prosedur pelayanan, kategori mutu pelayanan sangat baik. Kemudian pada persyaratan pelayanan dengan kategori mutu pelayanan sangat baik. Pada kejelasan petugas pelayanan, dengan kategori mutu pelayanan sangat baik. Selanjutnya berupa kedisiplinan petugas pelayanan, kategori mutu pelayanan sangat baik. Pada tanggung jawab petugas pelayanan, dengan kategori mutu pelayanan baik. Kemudian pada kemampuan petugas pelayanan, berkategori mutu pelayanan sangat baik, Kecepatan pelayanan, dengan kategori mutu pelayanan sangat baik. Selanjutnya keadilan mendapat pelayanan, kategori mutu pelayanan baik. Kesopanan dan keramahan petugas, dengan kategori mutu pelayanan baik. Kewajaran biaya pelayanan, berkategori mutu pelayanan sangat baik. Kepastian biaya pelayanan, dengan kategori mutu pelayanan baik. Kenyamanan lingkungan, dengan kategori mutu pelayanan baik. Serta keamanan lingkungan, dengan mutu pelayanan baik. Akan tetapi terdapat pada penelitian ini berupa kepastian jadwal pelayanan, mutu pelayanan kurang baik (Karmeli, 2014).

3.2.2 Pembahasan wawancara

3.2.2.1 Input

1. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena sumber daya manusia merupakan penggerak dari sebuah kebijakan yang ada. Keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan sebuah kebijakan juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Kebijakan akan berhasil jika kebijakan tersebut telah didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten pada bidangnya dan mencukupi, begitupun sebaliknya pelaksanaan kebijakan akan mengalami kegagalan jika sumber daya manusia yang ada tidak kompeten pada bidangnya dan jumlah sumber daya manusia yang ada tidak memadai (Kiswanto, 2016).

Dilihat dari SDM yang dimiliki memang masih terbatas sehingga SDM yang ada harus merangkap tugas. *Overlapping* tugas yang dihadapi cenderung menghambat kinerja dinas dalam mendorong kesuksesan pencapaian tujuan program KKBPK dan petugas yang hanya berjumlah 330 orang yang mana kalau menurut standar itu masih sangat kurang karena menurut standarnya itu 2.009 orang. Pelatihanpun diberikan kepada petugas agar meningkatkan kualitas dari petugas agar lebih baik untuk memberikan pelayanan.

2. Pendanaan

Sumber daya keuangan atau pendanaan menyangkut pengalokasian dana dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Pada pelaksanaan sebuah kebijakan sumber daya keuangan sangat penting, walaupun sebuah kebijakan sudah didukung dengan sumber daya manusia yang baik tapi dana yang ada tidak mencukupi maka kebijakan tersebut takkan terlaksana secara maksimal (Kiswanto, 2016).

Pembentukan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dibentuk oleh BKKBN dengan pendanaan di dapat dari 70% APBN dan 30% dari APBD Ketersediaan dana dalam pelaksanaan Program Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) biasanya pencairan nya itu bisa 1- 3 bulan baru bisa untuk pencairan dana nya untuk pelaksanaan kegiatan.

Aspek pendanaan yaitu anggaran kegiatan Program KKBPK dan program sektoral di Kampung KB melalui APBDDes, Alokasi Dana Desa (ADD) dan APBD serta sumber dana lainnya seperti APBN, Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pendanaan, selain menghambat keberjalanan program juga akan mempengaruhi motivasi dan produktifitas SDM seperti menurut hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Indriyani tahun 2014 gaji dan tunjangan kesejahteraan mempengaruhi produktifitas kinerja seseorang (Prastika, 2020).

3. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung dan pelaksana suatu kegiatan. Sarana dan prasarana dapat juga disebut dengan perlengkapan yang dimiliki oleh organisasi dalam membantu para pekerja di dalam pelaksanaan kegiatan mereka. Sarana Prasarana memegang peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan KKBPK. Material atau peralatan merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan KKBPK secara efektif dan cepat tanpa menggunakan sarana material atau peralatan yang kurang memadai (Dulkadir, 2016).

BKKBN telah memfasilitasi seperangkat bis dan bisa untuk berkeliling. Di dalam yang non fisik itu ada juga terkait pengadaan sarana seperti membuat KIE-kit dan alkohol, dan itu dibiayai oleh BUKB. Pendistribusian



saran dan prasana dalam pelaksanaan Program Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) sudah lumayan baik dari provinsi ke kabupaten/kota maupun faskes.

3.2.2.2 Proses

Pelaporan mengenai program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) biasanya langsung dimasukan dalam aplikasi jadi kabupaten dan kota langsung memasukan laporannya ke aplikasi tersebut jadi bisa langsung di terima oleh provinsi dan untuk pelaporan sudah sesuai semuanya. Pengolahan hasil pengelolaan data rutin pengendalian lapangan menggunakan metode data entri. Setelah pengolahan hasil pengelolaan data rutin pengendalian lapangan selesai dilakukan, maka akan didapatkan tabulasi *output* hasil pengendalian lapangan. Untuk memberikan umpan balik kepada para pengelola data dan informasi di setiap tingkatan wilayah diperlukan pencetakan dan pendistribusian tabulasi *output* hasil pengendalian lapangan tersebut.

3.2.2.3 Output

1. Penilaian

Penilaian dari SDM masih sangat kurang karena untuk sekarang masih memiliki 330 PKB untuk seluruh wilayah Kalimantan Selatan, sedang desa yang perlu ditangani itu sebanyak 2.009 desa. Seharusnya 1 orang PKB itu menangani maksimal 3 desa, artinya untuk sekarang masih belum mencukupinya SDM untuk dilapangan untuk Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Adapun dilakukannya pelatihan untuk petugas yang diberikan oleh BKKBN untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada, namun tidak ada nilai standar yang di tetapkan oleh BKKBN untuk hasil pelatihan tersebut untuk yang diberikan izin untuk betugas dilapanga, karena masih kurangnya SDM yang ada mengakibatkan harus diambilnya semua petugas yang ada sekarang.

Penilaian dari segi pendanaan sudah lumayan bagus karena dana sudah di sediakan oleh APBN dan APBD untuk kegiatan program Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Namun ada beberapa yang masih kurang dari segi pendana yaitu untuk pencairan dana itu memerlukan waktu yang lumayan lama sekitar 1-3 bulan namun hal ini bisa di antisipasi dengan menggunakan dana simpanan yang ada di BKKBN untuk sementara sebelum pencairan dana tersebut. Permasalahan yang lainnya yaitu untuk insentif untuk kader yang mana pada pengiriman uang insentif tersebut harus dilakukan melalui rekening bank yang mana itu bisa mengurangi insentif yang di dapat karena akan harus mengendap 50 ribu di bank biasanya.

Dengan masih kurang maksimalnya pelaksanaan dari program KKBPK membuat adanya membuat kebijakan baru atau program baru untuk meningkatkan program KKBPK dengan memberikan *reward* bagi petugas agar bisa meningkatkan kinerja dari petugas dan hasilnya pun terbukti dengan capaian yang lebih meningkat di bandingkan sebelumnya yang mana awalnya itu capaian nya sebesar 10,6% sekarang meningkat menjadi 11,02 persen.

2. Umpan Balik

Adanya Program Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bermanfaat bagi masyarakat tersebut yaitu dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keluarga berencana. Keuntungan lain yang didapatkan dengan adanya Kependudukan, Keluarga Berencana, Dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yaitu dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

4. SIMPULAN

- a. Semua variabel dalam Indeks Kepuasan Masyarakat berkategori puas
- b. Pada variabel *input* SDM: SDM belum mencukupi, terdapat pelatihan untuk petugas lapangan
- c. Pada variabel *input* pendanaan: 70% APBN, 30% APBD, pendistribusian belum cukup
- d. Pada variabel *input* sarana prasarana: sudah mencukupi, pendistribusian merata
- e. Pada variabel *input* kebijakan : adanya SK dari gubernur untuk meningkatkan capaian Program KKBPK
- f. Pada variabel proses: melakukan monev, *penginputan* laporan langsung ke aplikasi, terkendala pendanaan bagi kader dan tenaga lapangan, dan adanya kebijakan baru dari kepala BKKBN untuk memberi rewart

kepada petugas

- g. Pada variabel *output*: SDM kurang, pendanaan terkendala, BKKBN memfasilitasi bis untuk berkeliling, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang KB, meningkatkan kesehatan masyarakat, adanya peningkatan capaian program setelah diberikan nya kebijakan untuk memberikan reward untuk petugas

Saran :

Diharapkan dengan adanya hasil dari indeks kepuasan masyarakat di Desa Sungai Jingah Kota Banjarmasin, BKKBN dapat mendukung dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga agar kegiatan dapat berjalan secara optimal.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dana DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA – 023.17.2.677518/2021 tanggal 23 November 2020 sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 697/UN8/PG/2021 Tanggal 22 Maret 2021, serta Fakultas Kedokteran Program Studi Kesehatan Masyarakat dan tim yang telah membantu dalam pengerjaan penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- BKKBN. (2020). *Artikel: Menyongsong Wajah Baru Program KKBPK Menuju Tahapan Renstra BKKBN 2020-2024*. Diakses dari <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/menyongsong-wajah-baru-program-kkbpk-menuju-tahapan-renstra-bkkbn-2020-2024> tanggal 21 Maret 2020.
- Hidayat, R., & Wulandari, A. (2021). Penerapan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui Kuliah Kerja Nyata Tematik Tahun 2018 di Yogyakarta. *Altruist: Journal of Community Services*, 2(1).
- Januar, A.S. (2020). *Artikel: Sosialisasikan Program KKBPK ternyata ini Tujuan BKKBN*. Diakses dari <https://jatim.tribunnews.com/2017/10/20/sosialisasikan-program-kkbpk-ternyata-ini-tujuan-bkkbn?page=2> tanggal 21 Maret 2020.
- Karmeli, E. (2014). Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Program Keluarga Berencana di Kelurahan Samapuin Tahun 2013. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 1(5).
- Sondakh, B. R., Tampi, J. R., & Tumbel, T. M. (2019). Pengaruh Bukti Langsung, Kehandalan, Jaminan, Daya Tanggap dan Empati, Terhadap Kepuasan Pasien pada Puskesmas. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 9(3), 101-111.
- Suandi, S. (2019). Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat di Kantor Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 1(2), 13-22.
- Sudarmi. (2020). *Artikel: Upaya Peningkatan Kualitas Penduduk Melalui Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)*. <https://pengasih.kulonprogokab.go.id/files/artikel%20kb.pdf>. Diakses tanggal 21 Maret 2020.